



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Analisis *Cyberbullying* pada Masa Pilpres 2024 Berdasarkan *Social Bonds Theory*

Nadila Salsabila¹, Untung Sumarwan²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2043501606@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501606@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Cyberbullying is a very worrying issue, especially during the 2024 Presidential Election period where the digital age is experiencing rapid development. This study aims to investigate the factors that encourage cyberbullying during the 2024 Presidential Election campaign period in Indonesia. Using analysis based on Social Bonds Theory, this study seeks to identify the various driving factors behind cyberbullying behavior as well as actions or strategies that can be used to overcome it. Social Bonds Theory provides a framework that helps understand how social attachment, involvement in positive activities, and the influence of friendship groups can influence an individual's tendency to engage in deviant behaviors such as cyberbullying. The research is expected to provide deep insight into the social dynamics at play in cyberbullying during times of intense political campaigning, as well as offer solutions to reduce such incidents in the future.*

Keyword: *Campaign, Cyberbullying, Presidential Election, Social Bonds Theory.*

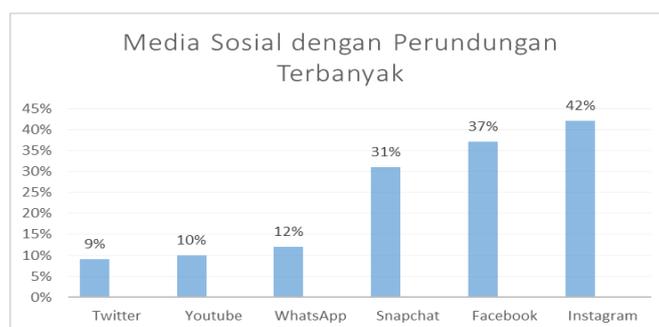
Abstrak: *Cyberbullying merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama selama masa Pemilihan Presiden 2024 di mana era digital mengalami perkembangan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong terjadinya cyberbullying selama periode kampanye Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia. Dengan menggunakan analisis berdasarkan Social Bonds Theory, penelitian ini berusaha mengidentifikasi berbagai faktor pendorong di balik perilaku cyberbullying serta tindakan atau strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Social Bonds Theory memberikan kerangka kerja yang membantu memahami bagaimana keterikatan sosial, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan pengaruh kelompok pertemanan dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seperti cyberbullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial yang berperan dalam cyberbullying selama masa kampanye politik yang intens, serta menawarkan solusi untuk mengurangi insiden tersebut di masa depan.*

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Kampanye, Pemilihan Presiden, Teori Ikatan Sosial.

PENDAHULUAN

Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital, umumnya perilaku *cyberbullying* terjadi pada platform media sosial. Tindakan merugikan ini menjadi semakin mengkhawatirkan dalam era digital, karena tindakan ini sangat mempengaruhi emosi dan psikologis korban (Rumra & Rahayu, 2021). Termasuk di Indonesia, salah satu wadah untuk mengakses informasi adalah melalui media sosial (Lestari & Nurlimah, 2020). Beberapa media sosial yang sangat digemari diantaranya adalah Instagram, WhatsApp, Tiktok, dan X. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perbuatan *cyberbullying* telah menjadi isu serius yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Terlebih lagi dalam masa pemilihan Presiden (Pilpres), *cyberbullying* menjadi sangat rawan mengingat akan adanya polarisasi. Polarisasi politik muncul saat dua elemen yang berbeda atau berlawanan berkaitan dengan isu, kebijakan, atau ideologi tertentu. Fenomena polarisasi ini menjadi sebuah tantangan baru dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif sejarah, polarisasi masyarakat sebagai akibat dari arena politik adalah hal yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia (Testriono, 2018). Polarisasi lebih umum terjadi di tingkat akar rumput atau massa daripada di kalangan elit politik. Menurut Faris Budiman dalam penelitiannya berjudul “Opini Publik Dalam Polarisasi Politik di Media Sosial”, dijelaskan bahwa polarisasi terjadi karena adanya komitmen yang kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau preferensi politik, sehingga menyebabkan pembagian kelompok dengan kelompok lainnya (Annas et al., 2019). Polarisasi menyebabkan setiap kelompok meyakini bahwa pandangan dan prinsip mereka adalah yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap keliru (Nashrullah, 2023).

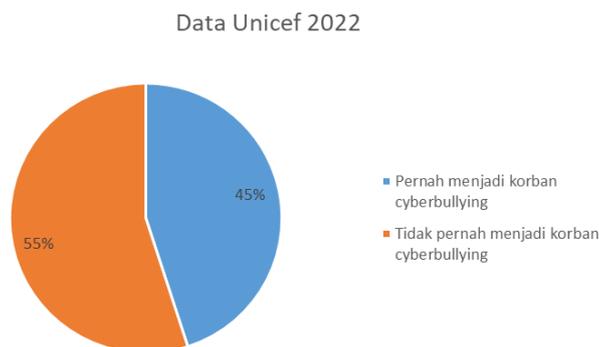
Peneliti dari *Network for Indonesian Democratic Society* (Netfid), Aida Mardatillah, mengindikasikan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian diperkirakan akan mengalami peningkatan menjelang Pilpres (beritapemilu.com, 2022). Khususnya dalam bentuk *cyberbullying* berupa hoaks kategori satir. Dia mengungkapkan bahwa konten yang cenderung menyerang tokoh politik atau saling serang antar pendukung partai politik menjadi perhatian utama dalam periode menjelang Pilpres. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, sosial media akan menjadi platform panggung di mana aktivitas politik seperti kampanye dan pengenalan calon dilakukan. Pada tahun 2021 platform Instagram diakui menjadi platform yang paling banyak digunakan untuk melakukan perundungan *online* atau *cyberbullying* (CNBC Indonesia TV, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga anti-bullying “*ditch the label*” terhadap 10 ribu remaja dari Inggris dalam rentang usia 12 hingga 20 tahun, 42% dari mereka mengakui bahwa mereka pernah menjadi korban *cyberbullying* di platform ini (CNBC Indonesia TV, 2021).



Sumber: Lembaga Anti-Bullying *Ditch The Label*

Gambar 1. Grafik Penelitian Platfrom Media Sosial Dengan Kasus Perundungan Terbanyak

Berdasarkan diagram diatas, dapat diartikan bahwa jumlah perundungan di media sosial yang salah satunya adalah platform Instagram, menimbulkan sejumlah tantangan baru terkait etika dan perilaku *online*. Terutama pada konten-konten yang bertema politik cenderung menjadi tempat yang rentan terhadap *cyberbullying* atau ujaran kebencian. Fenomena ini tidak hanya berdampak emosional pada individu, tetapi juga dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Center for Digital Society* pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA yang menjadi subjek penelitian, sekitar 45,35 persen dari mereka mengalami perundungan *online*, sementara 38,41 persen mengakui pernah melakukan *cyberbullying* (Haryo, 2023).



Sumber: UNICEF (Diolah Kembali oleh Peneliti)

Gambar 2. Data Pengguna Internet Yang Pernah Menjadi Korban Cyberbullying Tahun 2022

Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2022, sebanyak 45 persen dari 2.777 anak di Indonesia mengakui bahwa mereka pernah menjadi korban *cyberbullying*. Selain itu, data dari Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018 yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa 49% dari pengguna internet pernah mengalami perlakuan *cyberbullying* dalam bentuk ejekan atau pelecehan di platform media sosial (Jayani, databoks, 2019). Sementara itu, sebanyak 47,2% dari pengguna internet tidak melaporkan pengalaman risak tersebut. Penelitian dan survei tersebut menunjukkan bahwa siapa saja bisa menjadi korban *cyberbullying*. Banyaknya kasus *cyberbullying* di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak kebijakan atau ikatan sosial yang perlu dibenahi, menyelidiki berbagai faktor juga merupakan upaya dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* (Uliah Zuhra, 2017).

Para pelaku sering kali tidak menyadari dampak negatif dari tindakan mereka, dan beberapa di antaranya mungkin menganggapnya sebagai bentuk ekspresi diri atau reaksi terhadap perasaan pribadi mereka. Selain itu tidak sedikit kalangan masyarakat yang menormalisasikan hal tersebut. Dari banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebab dan mendorongnya seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan *cyberbullying* saat masa Pilpres 2024, faktor hoaks atau kesalahan informasi yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini. Salah satu hal dalam proses Pilpres yang perlu menjadi perhatian adalah regulasi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya perpecahan dan *cyberbullying*. Seperti yang diatur dalam Pasal 20 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, beberapa persyaratan harus dipatuhi oleh materi kampanye, termasuk menghormati dan mendorong pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memperhatikan moralitas, nilai-nilai agama, dan identitas nasional, serta meningkatkan kesadaran hukum (KPU, 2018). Materi kampanye juga diharapkan memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pendidikan politik, serta mempromosikan komunikasi politik yang positif antara peserta pemilu dan masyarakat untuk membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Selain itu,

penting untuk menghargai keragaman suku, agama, rasa, dan golongan dalam masyarakat. Di sisi lain, Pasal 21 dari peraturan yang sama menjelaskan bahwa materi kampanye dapat disampaikan dengan cara yang sopan, tidak mengganggu kepentingan umum, bersifat mendidik, bijak, dan beradab, serta tidak provokatif (Finaka, 2019).

Adapun penelitian ini akan memusatkan perhatian pada faktor-faktor terjadinya *cyberbullying* di media sosial selama periode kampanye Pilpres 2024. Berita hoaks atau kesalahan informasi menjadi salah satu faktor pendorong *cyberbullying* yang merugikan. Pemilihan Presiden seringkali menciptakan momen ketegangan tinggi, di mana perbedaan pendapat politik dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik *cyberbullying*. Salah satu kasus *cyberbullying* yang terjadi saat masa Pilpres 2024 ketika figur publik Ummi Pipik, yang mendapatkan banyak komentar negatif dari pengguna internet di akun Instagram miliknya. Serangan warganet terjadi setelah Ummi Pipik sebelumnya memposting cerita di Instagram terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 (Chasanah, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena *cyberbullying* yang terjadi selama periode kampanye Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kampanye Pilpres 2024 dapat menjadi faktor pendorong utama dalam praktik *cyberbullying*, serta untuk mengidentifikasi strategi atau kebijakan yang efektif dalam menangani dan mengatasi masalah tersebut berdasarkan *social bonds theory*.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode riset yang memanfaatkan data deskriptif dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan dari individu atau kelompok yang diamati, seperti komentar, pesan, dan gambar yang terkait dengan kampanye Pilpres 2024 di platform media sosial. Implementasi metode studi kasus akan dilakukan guna memahami konteks khusus dan dinamika interaksi di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan dinamika kelompok atau individu (Qotrun, 2022). Dengan memberikan sumbangan yang signifikan, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai *cyberbullying* yang terjadi dimasa Pilpres 2024, serta bagaimana platform media sosial, seperti Instagram, Tiktok, X, WhatsApp, berperan sebagai tempat interaksi yang memfasilitasi fenomena tersebut. Melalui penggabungan analisis kualitatif yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana masa kampanye di media sosial terkhususnya Instagram menjadi pemicu adanya *cyberbullying*, dan pada akhirnya dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi secara non-partisipatif, di mana penulis bertindak sebagai pengamat tanpa ikut campur dalam interaksi yang diamati. Observasi dapat difokuskan pada konten-konten seperti komentar, pesan, dan gambar yang terkait dengan kampanye Pilpres 2024 di media sosial. Dalam proses observasi, peneliti dapat mencatat dan menganalisis pola perilaku yang dapat di identifikasikan sebagai *cyberbullying* atau ujaran kebencian. Observasi ini dapat mencakup pemantauan terhadap respons dan tanggapan dari pengguna Instagram terhadap konten politik, selain itu peneliti dapat memperhatikan bagaimana interaksi antar pengguna, khususnya dalam konteks kampanye Pilpres dapat memengaruhi terjadinya *cyberbullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Cyberbullying* Pada Pemilihan Presiden 2024

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Hal tersebut telah tercantum pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat 1, "Menyampaikan

pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” (bpk.go.id, 1998). Namun, sayangnya, sebagian besar masyarakat seringkali salah dalam mengekspresikan aspirasi mereka, menghasilkan penggunaan kata-kata kasar, gambar-gambar kekerasan, dan sejenisnya. Melihat fenomena ini, penting untuk memperhatikan etika yang baik saat menggunakan media sosial, terutama dalam menyampaikan aspirasi. Etika ini berkaitan dengan perilaku manusia, termasuk perbedaan antara tindakan baik dan buruk, benar dan salah (Wardani, 2020).

Pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye merupakan sebuah perubahan besar dalam komunikasi politik di Indonesia. Peran media sosial telah membantu meningkatkan popularitas beberapa partai politik bahkan calon presiden. Beberapa partai politik telah menyadari pentingnya media sosial dalam meningkatkan popularitas partai terutama di era disrupsi seperti sekarang ini. Menurut Cobis dalam penelitian berjudul “Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik”, mereka menganggap bahwa kampanye terbuka sudah tidak lagi efektif karena memerlukan anggaran yang besar untuk menghadirkan massa yang besar dalam sebuah kampanye terbuka (Cobis, 2023).

Di era digital ini, media sosial menjadi wadah bagi banyak orang untuk bertukar informasi dan pendapat. Namun, kemudahan akses ini tak jarang disalahgunakan untuk melakukan *cyberbullying*. Menurut Aida Mardatillah, peneliti dari Network for Indonesian Democratic Society (Netfid), memperkirakan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian akan meningkat menjelang pemilu 2024 (Salim, 2022). Pengguna internet mudah tersulut emosinya hanya dengan membaca kata-kata di media sosial. Hal ini kemudian dibalas dengan kata-kata atau kalimat yang menghina, melecehkan, meremehkan, dan menyakitkan. Ketika ditegur, pelaku *cyberbullying* ini berlindung di balik dalih "beda pendapat", "kebebasan berpendapat", "hanya bercanda", atau "baperan". Kebencian di media sosial dimulai dari stereotip, komentar tidak sensitif, meremehkan dengan lelucon, hingga tindakan intimidasi, mengejek, nama panggilan, dan cercaan. Banyak masyarakat yang kebablasan dalam mengungkapkan pendapatnya dan terkesan "terlalu" bebas. Pendapat tersebut tak jarang mengandung unsur *bullying* dan kebencian terhadap orang lain. Menurut Santi dari penelitian berjudul “Analisis Terkait Perilaku Netizen Indonesia Dalam Fenomena Ujaran Kebencian dan Bullying di Media Sosial”, media sosial pun seolah menjadi tempat penghakiman, dengan para netizen sebagai hakim yang merasa paling benar. Ketika ditegur, para netizen ini kerap menyangkal kesalahan mereka dan berdalih bahwa mereka hanya mengutarakan pendapat (Santi, 2021). Namun, faktanya, mereka lebih condong ke arah kritik yang mengandung ujaran kebencian dan *bullying*, bukan sekadar pendapat. Perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan.

Hal serupa juga terjadi pada Pemilihan Presiden 2019 (Pilpres 2019), di mana masyarakat menggunakan media sosial untuk menyebarkan meme atau gambar yang dimodifikasi dengan tulisan atau *bubble chat*, baik untuk hiburan maupun untuk menjatuhkan dan merusak reputasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu (*smear campaign*). Meme dan gambar tersebut kemudian disebarluaskan secara viral melalui media sosial, seperti Twitter. Hal ini secara tidak sadar telah membawa masyarakat dalam lingkaran *cyberbullying* (Lestari & Nurlimah, 2020). Sarkasme juga merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang paling umum muncul dan digunakan oleh pengguna media sosial. Selain itu ada beberapa bentuk *cyberbullying* seperti penggunaan kata-kata yang kasar, umpatan, sindiran, ejekan, serta penggunaan julukan yang merendahkan orang lain. Menurut (Jamilah & Wahyuni, 2020) dari data yang dikumpulkan, terlihat bahwa pengguna media sosial sering memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah mereka dalam mengekspresikan pendapat dan perasaan. Fenomena ini sering disebut sebagai interferensi bahasa, alih kode, dan campur kode. Ujaran kebencian yang sering terlihat dalam kolom komentar saluran

YouTube berpotensi memiliki dampak negatif pada pola komunikasi masyarakat, terutama di negara kita yang memiliki keragaman budaya.

Beberapa contoh kasus *cyberbullying* saat momen Pilpres diantaranya, selebgram terkenal di Indonesia, Awkarin. Dimana mendapat kritikan dan komentar negatif dari netizen. Hal ini terjadi setelah Awkarin secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Melalui akun Twitter @awkarin pada hari Kamis, 11 Januari 2024. Awkarin merespons sebuah tweet yang menyebut namanya. Salah satu akun tersebut mengungkapkan rasa penasaran mengenai alasan atau dasar keputusan Awkarin dalam memilih pasangan Prabowo-Gibran. "A***r Awkarin seblak-blakan itu pilih Prabowo-Gibran," tulis @aristoughless dalam platform sosial media X (Azzahra, 2024). Contoh lain kasus *cyberbullying* adalah ketika Pendakwah dan istri mendiang Uje, Ummi Pipik, tiba-tiba menerima banyak hujatan dari netizen. Ummi Pipik dihujat karena mengkritik kecurangan dalam Pemilu 2024. Pemilu tersebut telah resmi dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, di mana masyarakat memilih pasangan calon untuk berbagai jabatan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Proses perhitungan suara masih berjalan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan calon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, unggul dibandingkan pasangan lainnya. Meskipun demikian, kemenangan pasangan 02 banyak mendapat tanggapan, salah satunya dari Umi Pipik. "Kalaupun ada kecurangan dan ketidakjujuran, dan kalaupun PBW sudah di-setting untuk menang, saya pribadi tetap bangga dengan pilihan saya," tulis Umi Pipik di postingan Instagram pribadinya. Kutipan ini diambil dari Instagram @lambe_danu pada Minggu, 18 Februari 2024 (Chasanah, 2024).

Contohnya kasus lainnya yang terjadi saat Pilpres 2019 adalah kasus kebohongan yang melibatkan Ratna Sarumpaet, seorang pendukung calon presiden Prabowo-Sandi. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Ratna Sarumpaet mengunggah foto wajahnya yang lebam, mengklaim bahwa ia menjadi korban penganiayaan. Berita ini menyebar dengan cepat dan menjadi viral, sehingga memicu respons dari para politisi, terutama dari kalangan oposisi, yang mengutuk tindakan penganiayaan tersebut. Beberapa bahkan menggunakan hal ini sebagai alat untuk menyerang pemerintah karena dianggap tidak melindungi warga negaranya. Namun, keesokan harinya, berbagai fakta mulai muncul, termasuk hasil penyelidikan polisi yang menunjukkan bahwa Ratna sebenarnya berada di rumah sakit kecantikan pada tanggal 21 September 2018 dan bukan menjadi korban penganiayaan. Akhirnya, Ratna mengakui bahwa informasi yang disebarkannya adalah hoaks (Anggraini et al., 2022).

Menurut Lestari dalam penelitian berjudul "Tinjauan Sosial Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019", berdasarkan data yang diperoleh dari unit kejahatan cyber Polda Sumatera Utara, jumlah kasus yang terjadi dalam rentang waktu 2012 hingga 2016 tidak melebihi 10 kasus, sementara untuk platform media sosial yang lain, jumlah kasusnya kurang dari 10 (Sinaga, 2019). Sehingga untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran ujaran kebencian di media sosial, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penyebab utama dari fenomena ini sering kali terkait dengan keterlibatan emosi yang kuat tanpa mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tindakan *cyberbullying* lebih sering terjadi di komunitas dan sekolah yayasan dibandingkan dengan sekolah umum. Konformitas atau pertemanan adalah bentuk pengaruh sosial yang dapat mengubah perilaku individu.

Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Cyberbullying*

Menurut Ibnu Hanafi dalam penelitian berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Cyberbullying* : A Literature Review", salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan *cyberbullying* adalah tekanan dari kelompok teman sebaya. Lingkaran

pertemanan yang negatif cenderung mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku *cyberbullying*.

Salah satu faktor *cyberbullying* dalam lingkungan pertemanan ditemukan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara eksklusif dengan seorang pelaku *cyberbullying* yang diidentifikasi dengan nama samaran "Andre," seorang remaja berusia 20 tahun. Andre mengungkapkan bahwa tindakannya dipicu oleh kekesalan terhadap pendukung pasangan calon presiden lain yang dianggapnya berlebihan dalam mendukung pilihan mereka. Ia menjelaskan, "Saya merasa marah karena pendukung paslon lain terlalu berlebihan, jadi saya melampiaskannya di media sosial" (Andre, 2024). Dalam wawancara tersebut, Andre menguraikan kronologi tindakannya yang melibatkan beberapa bentuk *cyberbullying* selama masa kampanye Pilpres 2024:

1. Pertama, ia mengunggah video di platform TikTok yang merendahkan dua pasangan calon presiden. Dengan membuat komparasi
2. Kedua, ia membuat video yang menunjukkan dirinya melempar baliho milik salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
3. Dan ketiga, Andre menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan saat berdiskusi di platform WhatsApp.

Andre menjelaskan bahwa perilaku tersebut didukung oleh lingkungan pertemanannya yang juga melakukan tindakan serupa. "Lingkungan pertemanan saya juga sering melakukan hal yang sama, jadi saya merasa didukung untuk melakukan hal tersebut" (Andre, 2024). Wawancara ini mengungkapkan bahwa faktor sosial, terutama pengaruh dari lingkungan pertemanan, memainkan peran signifikan dalam perilaku *cyberbullying* yang dilakukan Andre.

Analisis Teori *Social Bonds* Terhadap Perilaku *Cyberbullying*

Travis Hirschi, seorang ahli kriminologi, mengemukakan bahwa orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung berperilaku sesuai dengan norma masyarakat yang tidak tertulis (Kotlaja, 2018). Sebaliknya, mereka yang terisolasi secara sosial lebih berisiko berperilaku kriminal. Hirschi memandang ikatan sosial sebagai hubungan apapun, bisa dengan keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing di sekitar kita. Ikatan ini membentuk "kesepakatan tidak tertulis" yang secara tidak sadar mendorong orang untuk berperilaku baik. Semakin kuat ikatan sosial seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti dan mempertahankan tatanan sosial yang ada.

Teori ini menekankan pentingnya empat ikatan kunci antara individu dan masyarakat. Diantaranya, keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Keterikatan merujuk pada hubungan emosional yang dimiliki seseorang dengan keluarga, teman, dan tokoh penting lainnya. Keterikatan yang kuat menumbuhkan rasa memiliki dan nilai dalam masyarakat, membuat individu cenderung tidak ingin melanggar normanya. Komitmen merujuk pada investasi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan konvensional, seperti pendidikan, karier, dan kehidupan keluarga. Ketika individu memiliki tujuan yang sedang mereka perjuangkan, mereka cenderung tidak terlibat dalam kegiatan berisiko yang dapat membahayakan kemajuan mereka. Keterlibatan merujuk pada jumlah waktu dan energi yang seseorang dedikasikan untuk kegiatan konvensional seperti sekolah, pekerjaan, atau kegiatan ekstrakurikuler. Berpartisipasi dalam kegiatan ini memperkuat ikatan sosial dan memberikan rasa tujuan, sehingga mengurangi daya tarik perilaku menyimpang.

Kepercayaan merujuk pada internalisasi nilai dan moral masyarakat. Ketika individu percaya pada keabsahan norma sosial, mereka lebih cenderung untuk patuh dan tidak akan menantanginya melalui tindakan kriminal. Teori ikatan sosial menyatakan bahwa melemahnya salah satu ikatan ini dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap kenakalan. Misalnya,

seorang anak muda dengan ikatan keluarga yang lemah, kurang komitmen terhadap tujuan masa depan, dan tidak terlibat dalam kegiatan sekolah mungkin lebih rentan terhadap perilaku kriminal.

Menurut *Social Bonds Theory*, keterlibatan individu dalam kegiatan prososial atau konstruktif mengurangi kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk *cyberbullying*. Dalam kasus ini, tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh narasumber mencakup mengunggah video yang merendahkan dua pasangan calon presiden di TikTok, membuat video perusakan baliho milik salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta menggunakan kata-kata merendahkan saat berdiskusi di platform WhatsApp. Narasumber mengakui bahwa tindakannya didorong oleh kekesalan terhadap pendukung pasangan calon lain yang dianggap terlalu berlebihan. Lebih lanjut, narasumber menyebutkan bahwa perilakunya tersebut didukung oleh lingkungan pertemanannya yang juga cenderung melakukan tindakan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kelompok pertemanan yang negatif dapat meningkatkan risiko perilaku *cyberbullying*, sejalan dengan teori ikatan sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan dalam aktivitas positif untuk mencegah perilaku menyimpang. Teori ini berfokus pada penjelasan bagaimana hubungan personal antar individu penting untuk mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal (atau anti sosial). Ketika individu memiliki hubungan pro-sosial dalam masyarakat mereka, mereka lebih mungkin untuk mempercayai nilai-nilai pro-sosial dan terlibat dengan institusi pro-sosial. Nilai-nilai dan ikatan pro-sosial ini akan mengarah pada penurunan keterlibatan dalam kegiatan kriminogenik. Oleh karena itu, ketika ikatan sosial rusak, tidak ada, atau melemah, peluang seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminogenik meningkat (Negrete, 2022).

Menurut Sakban dalam penelitiannya berjudul “Pencegahan *Cyber Bullying* Di Indonesia”, penegak hukum memiliki peran dalam mencegah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dengan melibatkan upaya pre-emptif, yang mencakup penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye kepada masyarakat untuk mencegah kejadian tersebut (Sakban & Sahrul, 2019). Aparat kepolisian juga berperan dalam menanggulangi *cyberbullying* dengan pendekatan pre-emptif, yang mencakup beberapa langkah seperti pelatihan khusus dan pendidikan kejuruan yang dilakukan bekerja sama dengan para ahli teknologi informasi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kejahatan *cyber*. Selain itu, kerja sama internasional juga dilakukan dalam upaya pemberantasan *cyberbullying*, dan peningkatan penggunaan teknologi diperlukan mengingat perubahan teknologi informasi dan komunikasi setiap dekade.

Meningkatkan hubungan sosial antar individu juga dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah *cyberbullying*. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan interaksi sosial tatap muka, mengurangi waktu *online* dan mendorong interaksi sosial langsung dapat memperkuat hubungan interpersonal dan mengurangi potensi *cyberbullying*. Membangun komunitas yang positif, menciptakan komunitas yang inklusif dan suportif di media sosial dapat membantu individu merasa diterima dan mengurangi kemungkinan mereka menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*. Meningkatkan edukasi tentang *cyberbullying*, memberikan edukasi tentang dampak negatif *cyberbullying* dan cara mencegahnya dapat membantu individu memahami konsekuensi tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran untuk menghormati orang lain di dunia *online*. Membangun norma sosial yang positif terhadap penggunaan media sosial juga penting untuk mencegah *cyberbullying*. Dengan menerapkan strategi pencegahan berdasarkan *Social Bonds Theory*, masyarakat dapat menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan positif bagi semua orang. Penting untuk diingat bahwa *cyberbullying* adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada korban. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun

komunitas online yang lebih inklusif dan suportif, di mana setiap orang merasa aman dan dihormati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui metode observasi dan wawancara, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan pertemanan dapat menjadi faktor pendorong dalam tindakan *cyberbullying* pada masa Pilpres 2024. Dalam upaya tindakan pencegahan melalui Teori Ikatan Sosial oleh Travis Hirschi, yang menjelaskan bahwa hubungan personal antar individu sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terlibat dalam kegiatan kriminal atau antisosial. Ketika individu memiliki hubungan pro-sosial, mereka lebih cenderung mempercayai nilai-nilai pro-sosial dan terlibat dalam institusi pro-sosial, yang pada gilirannya mengurangi keterlibatan dalam kegiatan kriminogenik. Selain itu peran penegak hukum dalam mencegah *cyberbullying* di Indonesia juga tidak kalah penting. Melalui upaya pre-emptif seperti penyuluhan, sosialisasi, pelatihan khusus, dan pendidikan kejuruan. Meningkatkan hubungan sosial antar individu dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah *cyberbullying* dengan mengurangi waktu *online* dan memperkuat hubungan interpersonal secara langsung. Selain itu, membangun komunitas yang positif di media sosial dan meningkatkan edukasi tentang *cyberbullying* juga penting dalam menerapkan strategi pencegahan berdasarkan Teori Ikatan Sosial. Dengan kerja sama yang baik, masyarakat dapat membangun lingkungan *online* yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang.

REFERENSI

- Ahdiat, A. (2023). *Literasi Digital Indonesia Naik pada 2022, tapi Budaya Digital Turun*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/literasi-digital-indonesia-naik-pada-2022-tapi-budaya-digital-turun>
- Aldila Daradinanti, V. K. (2022, December). Kesesatan Berpikir: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghindarinya. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/23/103000469/kesesatan-berpikir-pengertian-jenis-contoh-dan-cara-menghindarinya?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20situs%20Effectiviology%2C%20pengertian,tidak%20valid%20dan%20tak%20relevan.>
- Anam, K. (2023, February). Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20Ekonom%20Senior,Negara%20di%20Korea%20sudah%2097%25.>
- Andre. (2024, April). Interview Penelitian Cyberbullying Pilpres 2024. (N. Salsabila, Interviewer)
- Anggraini, D., Ariesta, A. W., & Wuryanta, A. G. E. W. (2022). Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/interaksi.11.1.1-12>
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini Publik Dalam Polarisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2), 111.
- Azzahra, A. A. (2024, January 12). Terang-Terangan Dukung Prabowo-Gibran, Awkarin Kena Semprot Netizen Hingga Dihujat. Retrieved from <https://www.kilat.com/nasional/84411489783/terang-terangan-dukung-prabowo-gibran-awkarin-kena-semprot-netizen-hingga-dihujat>
- beritapemilu.com. (2022, August). Retrieved from beritapemilu.com:

- <https://beritapemilu.com/4227/jelang-pemilu-konten-yang-marak-muncul-cyber-bullying-kategori-satir/>
- BPK RI. (n.d.). Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008#:~:text=Undang%20Undang%20ini%20mengatur%20mengenai,rahasia%2C%20jukur%2C%20dan%20adil.](https://peraturan.bpk.go.id/peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008#:~:text=Undang%20Undang%20ini%20mengatur%20mengenai,rahasia%2C%20jukur%2C%20dan%20adil.)
- Chasanah, W. H. (2024, February). Umami Pipik Dirujuk Netizen Imbas Sentil Kecurangan Pemilu, Abidzar Al Ghifari Langsung Gercep Minta Maaf: Saya Mewakulkan Keluarga. Retrieved from <https://www.grid.id/read/044021598/ummi-pipik-dirujuk-netizen-imbassentil-kecurangan-pemilu-abidzar-al-ghifari-langsung-gercep-minta-maaf-saya-mewakulkan-keluarga?page=all>
- CNBC Indonesia TV. (2021, March). *CNBC Indonesia TV*. Retrieved from CNBC Indonesia TV: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210329162607-39-233727/instagram-jadiplatform-cyberbullying-tertinggi>
- Cobis, M. Y. (2023). Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik. *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, *Vo. 3 No.*, 1585–1597. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i4.540>
- Finaka, A. W. (2019). Syarat-Syarat Materi Kampanye Pemilu. Retrieved from https://indonesiabaik.id/motion_grafis/syarat-syarat-materi-kampanye-pemilu
- Jamilah, F., & Wahyuni, P. (2020). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar YouTube pada Tahun Politik Pemilihan Presiden 2019. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing*, *3(2)*, 325–341. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v3i2.1109>
- J.I., S. (2018). Cyberbullying Among Adolescents: An Effort Of Identification, Prevention and Intervention of Cyberbullying. *Indian Journals.com*. Retrieved from <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:jims8i&volume=6&issue=1&article=001>
- Jayani, D. H. (2019). Retrieved from [databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos)
- Jayani, D. H. (2019, Mei). Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>
- Kotlaja, M. (2018). Social Bonds Theory of Crime. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327228397_Social_Bonds_Theory_of_Crime
- KPU. (2018). Retrieved from [jdih.kpu.go.id: https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577067253344253344](https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577067253344253344)
- Lestari, U. A., & Nurlimah, N. (2020). Prosiding Jurnalistik Cyberbully dalam Pilpres 2019 di Media Sosial. *Prosiding Jurnalistik*, 36–39. <http://fauziteater76.blogspot.com/2013/07/claude-levi-strauss-merdeka.com>
- (2017). Rendahnya literasi digital jadi penyebab penyebaran berita hoax. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/rendahnya-literasi-digital-jadi-penyebab-penyebaran-berita-hoax.html>
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum*, *1(2)*, 20–38.
- Negrete, J. A. (2022). *The Risk of Adolescent Victimization: Assessing Elements of the Social Bond Theory*. May.
- NSW. (2011). Rational choice crime prevention. Retrieved from https://www.crimeprevention.nsw.gov.au/Documents/rational_choice_factsheet_nov2014.pdf

- Qotrun. (2022). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#google_vignette
- Rumra, N. S., & Rahayu, B. A. (2021, April). Perilaku Cyberbullying pada Remaja. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN JIWA*. Retrieved from <https://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/32#:~:text=Cyberbullying%20merupakan%20bentuk%20kekerasan%20anak,tidak%20ditindaklanjuti%20oleh%20pihak%20sekolah>.
- Salim, H. J. (2022, August 27). Hoaks dan Ujaran Kebencian Diprediksi Meningkatkan Jelang Pemilu 2024. Retrieved from <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5051755/hoaks-dan-ujaran-kebencian-diprediksi-meningkat-jelang-pemilu-2024>
- Tedy. (2019). Pesta Demokrasi yang Tenggelam dalam Fenomena Political Cyber Bully. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pesta-demokrasi-yang-tenggelam-dalam-fenomena-political-cyber-bully>
- Uliah Zuhra, K. S. (2017). Hubungan Kontrol Sosial Sekolah Dengan Perilaku Cyberbullying Pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Kota Banda Aceh. *JURNAL ILMIAH MAHASISA*. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/3014>
- UNICEF. (n.d.). Retrieved from UNICEF Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Utami Asty Lestari, N. N. (2020). Cyberbully dalam Pilpres 2019 di Media Sosial. 36. Retrieved from <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/Jurnalistik/article/viewFile/20245/pdf>
- Wardani, Rama W. K. (2020). Pola Komunikasi Hatespeech Dan Cyberbullying Di Media Sosial. *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*, 4, 44–56.